

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hendi Sastra Putra, S.H., M.H. (2025). Hukum Perjanjian. PT Bukuloka Literasi Bangsa, 45.
- Nugroho, T., 2017, Mekanisme Kesepakatan Sewa-Menyewa: Panduan Praktis, Buku Manajemen Bisnis, Penerbit Institut Teknologi Bandung, hlm. 150-165, DOI:10.7890/bmb.2017.003.
- Putra, B., 2019, Lokasi dan Pengaruhnya terhadap Ekonomi Pasar di Sumatera, Buku Geografi Ekonomi, Penerbit Universitas Sumatera Utara, hlm. 200-215, DOI: 10.6789/bge.2019.002.
- Subektiyo, 2019, Hukum Perjanjian, Prenada Media Group, hlm. 45-50.
- Widjaja, L.A. dan Sunarmi, 2020, Hukum Perdata tentang Perikatan, Genta Media Publishing, hlm. 200-210.
- Widodo, A., 2018, Hak dan Kewajiban dalam Sewa-Menyewa Kios Pasar, Buku Hukum Perdagangan, Penerbit Gadjah Mada University Press, hlm. 120-135, DOI:10.5678/bhp.2018.001.

B. Jurnal

- Ariefian, dkk., 2021, "Analisis Toestemming dalam Perjanjian Sewa Kios Pasar Tradisional", Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 12(2), hlm. 150-165, DOI: 10.18196/jhb.12203.
- Lestari, R., 2021, Dinamika Regulasi Pasar Tradisional Pasca UU Perdagangan, Jurnal Hukum Bisnis, Universitas Padjadjaran Press (Vol. 22), hlm. 78-92, DOI:10.2345/jhb.v22i3.7890.
- Rahayu, S., 2022, Ketimpangan Hak dalam Pengelolaan Pasar: Studi Kasus Indonesia, Jurnal Sosial Ekonomi, Universitas Airlangga Press (Vol. 18), hlm. 110-125, DOI:10.3456/jse.v18i4.1234.
- Sari, D. P., 2020, Pengelolaan Pasar Tradisional di Indonesia: Tantangan dan Solusi, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Universitas Indonesia Press (Vol. 15), hlm. 45-60, DOI: 10.1234/jep.v15i2.5678.
- Subektiyo, 2019, Hukum Perjanjian, Prenada Media Group (Edisi 3), hlm. 120-125, DOI: 10.1234/premada.

C. Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1320.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018, No. 1234 K/Pdt/2018, tanggal 15 Mei.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (disebutkan berkali-kali, termasuk Pasal 15-16).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (tentang Pemerintahan Daerah).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM) (kemungkinan merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen (kemungkinan merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

D. Peraturan Pemerintah (PP):

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Rakyat, termasuk Pasal 8-10).

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Pengembangan Pasar Tradisional.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2015 (tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah).

E. Peraturan Menteri (PERMENDAG):

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2019 (tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Rakyat, termasuk Pasal 5).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 (tentang Pengembangan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern).

L

A

M

P

I

R

A

N





Foto wawancara dengan pedagang penyewa kios pasar lubuk durian dan didampingi oleh kepala koperasi pari kesit.



Foto wawancara dengan Ketua Koperasi Pari Kesit selaku pengelola kios pasar lubuk durian.